

Polisi dalam Turbulensi Politik

Sutrisno¹

Abstraksi:

Artikel ini melacak (pergeseran) peran polisi di sepanjang proses demokrasi. Posisi fungsi polisi yang ajek dan konstan akhirnya harus dibaca sebagai mitos, karena kemudian ia menjadi variabel dependen dari turbulensi politik. Dua hasil riset, Meksiko dan Riset Hung-En Sung terhadap 59 negara dalam tahap demokratisasi menempatkan polisi pada posisi yang sulit. Menilai (kinerja) polisi dengan cara melepaskan dari ruang politik yang mengitarinya hampir metode yang utopis. Factor perilaku rejim yang berkuasa mempengaruhi persepsi masyarakat dan dimensi desakan (tuntutan) terhadap institusi kepolisian untuk berubah, sehingga ada hubungan kuat antara kinerja polisi dengan demokratisasi.

Kata Kunci: Peran Polisi, Demokratisasi, Politik

Masyarakat Pasca Modern ; Aturan main yang rapuh

Meminjam cara berfikir Michael Foucault dalam komentarnya terhadap (masyarakat) demokrasi ; kekuasaan telah meleleh-tercecer kemana-mana. Kekuasaan tidak lagi bertumpu pada satu, dua, atau lima lembaga. Kepingan – kepingan kekuasaan itu ada di kamar tidur, di ruang keluarga, di pasar tradisional, di mall, di pesantren, di gereja, di ruang rapat, di trotoar, di salon atau tukang cukur, di ruang oval, di panti pijat. Politik sebagai wahana distribusi kekuasaan tidak mampu memasuki ruang-ruang tersebut; dan, melalui kontestasi budaya negara (penguasa politik) dipaksa untuk tahu diri terhadap batas-batas gelanggang dimana drama kekuasaan harus dimainkan.

Keterceceran kekuasaan merupakan ujung agenda besar proyek demokrasi. Socrates filsuf berpengaruh lebih dari dua ribu limaratus tahun yang lalu mengerenyitkan dahi merenungi gagasan demokrasi ini,

¹ Sutrisno A. Pinandito, sebelum bergabung dengan PTIK, adalah mantan penanggungjawab riset sosiologi pada The International Institute of Islamic Thought – Indonesia. Sekarang sedang menyelesaikan disertasinya di Universitas Indonesia tentang polisi dalam gelombang demokrasi.

dan kemudian mewanti-wanti untuk menimbang ulang dua – tiga kali menerapkan sistem ini. Melalui demokrasi, katanya, orang – orang bodoh memerintah orang – orang pintar. Betapapun menawannya logika Socrates, kemasuk-akalan penjelasan “bapak” filsuf ini tak sanggup membendung arus demokrasi. Sejarah, untuk yang satu ini, tak berpihak Socrates; karena demokrasi akhirnya seperti takdir yang bergerak, dalam istilah Antony Giddens, bak *jurgenout*² yang lari tunggang langgang dengan impuls tak terhentikan.

Sulit dilacak apakah realitas di bawah ini merupakan bias demokrasi yang lari tunggang langgang atau (justru) *on the track* : bahwa agensi³ lebih kuat ketimbang struktur. Marilah disini kita sebut terminologi struktur ini menjadi kolektivitas, sebagaimana mendekati cara sosiologi Amerika merumuskan persoalan pertentangan antara individu versus masyarakat. Agaknya (sosiologi) Amerika betapapun menempatkan individu dan kolektivitas saling berdialektika namun pendulumnya berat ke sebelah kanan kearah ‘kemenangan’ individu. Sebutlah misalnya Peter L. Berger. Kolektif (atau produk kolektif) dengan sendirinya bersifat rapuh (frigid) karena harus menenggang agensi. Sakralitas, meminjam Emile Durkheim⁴ (Eropa), yang selalu merupakan produk kolektif itu sesungguhnya tidak lagi (di)sakral(kan)⁵. Pengertian ini menegaskan ‘yang sakral’ justru ‘yang agensi’, bukan yang dibangun dalam kesepakatan kolektif. Realitas tidak seajek yang difikir kaum positivis.

Arus berfikir ini dipandang mengganggu kalangan modernis⁶ atau kubu cara berfikir yang terlanjur *menggandrungi* struktur modern disepanjang

2. Antony Giddens, penasehat Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Tony Blair, menyebut kata ini (*jurgenout* = truk besar) dalam mengomentari perkembangan kapitalisme belakangan ini.
3. Istilah ini untuk menyebut kebebasan individu dalam sosiologi eropa.
4. Dalam “The Elementary” Durkheim melacak asal usul agama, dengan kata lain melacak tentang asal usul “Yang Sakral”. Totem menjadi sacral hanya karena ia bersifat kolektif. Ritus dikembangkan untuk melanggengkan sakralitas Totem, dengan sendirinya terminology tentang kesalehan (kategori orang saleh) adalah pengabdianya terhadap Totem dan kekhususan dalam ritus; dengan kata lain pengabdianya terhadap kolektivitas.
5. Kalau masyarakat modern dengan rasionalitas instrumentalnya melahirkan kapitalisme merupakan aufklarung jilid satu, maka ‘melumernya’ modernisasi melalui gempuran teori Kritis Mazhab Frankfurt dan sejumlah post-strukturalis maka gagasan merekonstruksi tatanan masyarakat hari ini merupakan aufklarung jilid dua.
6. Modernisme adalah saudara kembar kapitalisme dan anak kandung positivisme. Tidak sulit menjelaskan proposisi ini karena begitu gamblang fakta sejarahnya. Jargon-jargon yang dipandang menjadi dewa hingga kini; kuantifikasi, kalkulasi, pembangunan, pertumbuhan ekonomi, keterwakilan, virus Need Achievement, akuntabilitas, transparansi. Dan tentu masih banyak deretan konsep lain sejenisnya adalah bantalan dimana korporasi raksasa di Washington melenggang diatasnya. Tak perlu sarkastik layaknya demonstrasi jalanan terhadap kiprah korporasi raksasa ini karena semua terjadi melalui pertukaran “suka-rela”.

abad ke-20. Nasionalisme misalnya, sebagai produk kolektif, bukanlah konsep yang berhenti. Ia bergerak dalam pendulum heroisme kolektivitas di satu sisi berhadapan dengan egois-pragmatik di sisi lain. Tidak perlu buru-buru meletakkan penilaian aroma tak sedap terhadap egois-pragmatik ini, karena justru ia lahir dari rahim demokrasi. Begitu pula terhadap (batas) negara dan (tafsir) ideologi – sebutlah Pancasila -- selalu bergerak⁷. Saya harus mengucap kata ma'af untuk proposisi yang satu ini. Tata kelola hubungan pusat – daerah tak jalias lagi antara teori negara ber-federal dengan ber-otonomi. Yang menyatukan adalah agenda kemanusiaan, bukan agama, kelas sosial atau segala bentuk sistem ideologi. Adagium yang dipegangi polisi (diawali Perancis?) melekat pada kerangka perfikir ini; tugas polisi pada wilayah *human security*, bukan *state security*. Prinsip kerjanya menghitung setiap aksi untuk menghindari tetesan darah, tak perlu mendiagnosis apa ideologi darahnya. Darah tidak mengenal batas ideologi.

Polisi pada hari ini seperti institusi profetik yang bekerja (sendirian) pada arus mondial yang purba⁸. “Piramida korban manusia”, ujar sosiolog humanis Peter L. Berger, adalah pembacaan pedas terhadap sistem mondial atas bentuknya yang canggih namun dalam substansi yang purba. Lagi-lagi, realitas tidak seajek seperti yang difikir kaum positivis. Thesis Francis Fukuyama (*The End of Ideology*) dan yang menegasikanya Samuel Hattington (*The Class of Civilization*) hanya dalam hitungan sekitar delapan tahunan tidak lagi seksi ditengah pusaran kontestasi wacana. Ideologi ternyata hanya bergeser, tidak mati seperti yang tesiskan Fukuyama, benturan peradaban-pun ternyata *tak begitu-begitu amat*. Dalam pergerseran ideologi ini pemimpin reformis China mengawali arus kebangkrutan format ideologi lamanya dengan mengatakan tak peduli kucing merah atau putih, yang penting mampu menangkap tikus. Sejarah Indonesia berbeda dengan Cina – kalau telalu sarkastik untuk dibilang terbalik -- menjelang pemilu presiden kembali diramaikan label ideologi (ideological tag); bak peperangan di era purba cap ideology sesat bisa dengan mudah dipungut kemudian dilemparkan kepada ke muka lawan politik. Tak

7. Pengertian ini (batas negara) sesungguhnya sublim. Timor-timur hanya 'lepas' secara ideologik dari Indonesia; tidak ekonomi dan sosial budaya. Aceh hanya beda kecil dengan Timor Leste; di Aceh masih berkibar merah putih, Timor Leste tidak lagi!

8. Untuk tidak merasa sendirian pelibatan masyarakat (non-polisi) dalam ikhwal keamanan sepuluh tahun belakangan (melalui Program Polmas) merupakan 'kesadaran baru' yang *genuin* dalam membaca zaman. Program ini menjadi stasiun melelehnya struktur otoritas pendefinisi tunggal realitas keamanan. Dalam kontek ini ada Pekerjaan Rumah, misalnya seberapa besar ruang interupsi masyarakat terhadap tata kelola organisasi kepolisian. Hemat saya, dengan keluarnya Undang – Undang Informasi Publik batas ruang interupsi masyarakat harus segera 'ditegaskan'.

ada wasit dan pengadilan dalam lempar-lemparan ini. Hanya Revison Baswir, ekonom karismatik UGM, mengadili dan memutuskan bahwa ketiga kontestan sesungguhnya berada dalam kubu yang sama neo-lib.

Drama ini menunjukkan betapa turbulensi tatanan sosial menempati ordernya sendiri dalam kapitalisme hari ini. Turbulensi ini bermuara dari relasi kekuasaan pada level hulu pendefinisi realitas. Mereka, para pendefinisi realitas ini adalah para pekerja politik, orang-orang kampus (intelektual), petinggi agama, dan pemilik modal. Otoritas keamanan (polisi) menjadi "buruh" yang bekerja menjaga "kebenaran" produk relasi kekuasaan pada level hulu itu. Definisi kebenaran hasil konstruksi relasi kekuasaan pada level hulu ini acap kali terputus (*missing*) dengan penyelenggara keamanan pada level menengah dan bawah.

Skandal Antasari Azhar menguatkan sinyalemen ini. Sejumlah pelaku pembunuhan Nazarudin melakukannya atas pengabdian terhadap negara dan kecintaannya terhadap tanah air (dan mungkin juga atas nama Tuhan). Yang mereka ketahui hanyalah Target Operasi merupakan musuh negara karena rencana menggagalkan Pemilu 2009. Betapapun dalam dimensi moral teori organisasi 'mewasiatkan' setiap personil berani menolak atasan (Mabes) untuk tidak main hukum sendiri, namun teks aturan main dalam kode etik penyelenggara hukum untuk semenrata bisa (ter/di)lupakan untuk kasus yang memberi ruang bagi argumen diskresi. Dengan demikian "pahlawan" pembunuh Nasrudin tak perlu bertanya banyak kepada pemberi instruksi tentang hal ikhwal "musuh negara" yang menjadi TO-nya, karena ideologi yang bekerja pada otak kirinya⁹ tentang sistem komando berjalan dengan sempurna. Singkatnya, sosialisasi ideologi militeristik (masih) bekerja dengan baik pada insititusi keamanan ini. Upah limaratus juta tidak mengurangi kadar kepahlawanan si pemberantas "musuh negara" karena ideologi yang bekerja dalam kapitalisme hari ini adalah antara persekutuan materialisme dengan 'spiritualisme'; menyatunya – dalam terminologi Max Weber – rasionalitas instrumental dengan rasionalitas nilai.

9. Otak kiri adalah ruang bekerjanya intuisi. Dalam terminologi Max Weber ruang otak sebelah kiri ini mewadahi semua jenis rasionalitas yang berbasis non-instrumental.

Reformasi Kepolisian dan Demokratisasi; Kasus sejumlah negara

Sejumlah pengamat membeberkan *warning*¹⁰ terhadap kemungkinan peluang merosotnya demokrasi. Ketika konsolidasi demokrasi menjadi 'jimat' yang dipegangi preskripsi dalam menjaga demokrasi, maka polisi menempati posisi strategis dalam kontestasi sejumlah elemen itu. Karena, pertama, demokratisasi bagaimanapun adalah sebuah pencarian bentuk atas model demokrasi yang *compatible* dengan konteks struktur dan kultur. Pencarian bentuk ini menyangkut "tawar-menawar" dalam mendefinisikan ideologi yang (terlanjur) dianut suatu negara. Pergeseran ini merembet pada konstruksi paradigma kepolisian. Irlandia Utara, yang akan diurai di bawah, adalah kisah sukses pergeseran paradigmatis kepolisian.

Kedua, demokratisasi menyangkut 'hadirnya kebebasan' setelah runtuhnya rezim otoritarian. Proposisi ini acap kali difahami tanpa tolok ukur dalam mengekspresikan kebebasan. Stigma kebebasan yang *kebablasan* mungkin tidak terlalu salah dialamatkan pada ekspresi yang mengajukan kritik tanpa adab; atau kebebasan disepadankan dengan kehidupan sosial tanpa otoritas. Mass media menjadi ruang sosialisasi nir-nilai, dimana anak bangsa kehilangan kesantunan politik, dan negara kehilangan vitalitas untuk mengontrol agen sosialisasi nir-nilai ini.

Dua dimensi yang menyertai demokratisasi ini menempatkan polisi berada dalam posisi gamang; pergeseran paradigmatis dan realitas kejahatan dan bentuk konflik yang belum pernah ditemui sepanjang sejarah kepolisian negara. Persoalannya, polisi berada dalam posisi dilematis seperti di sejumlah negara yang akan ditunjukkan di bawah ini. Pada satu sisi dalam aturan main demokrasi posisi polisi disterilisasi dari ruang politik, sisi lain produk politik itulah yang justru tidak ramah terhadap bekerjanya sistem keamanan. Dalam kalimat singkat, faktor keamanan pada segala levelnya justru menggelinding dari ruang politik¹¹. Berikut adalah kisah dialektika kepolisian dengan turbulensi politik di sejumlah negara.

Meksiko. Data ini diperoleh dari riset Diane E. Davis, *Undermining*

10. Sejumlah nama untuk ini misalnya Guillermo O'Donnell (1993). Dan, David Held, meskipun agak lunak namun tarikan terhadap kembalinya otoritarian dalam proses transisi cukup kuat. Lihat pula Aanders Uhlin (1998)
11. Pada pertengahan era Orde Baru sangat jelas sinyelamen ini. Ada kisah, mobil keluarga Cendana hilang ketika diparkir di sebuah mall selepas waktu isya. Melalui "kesigapan" polisi menjelang subuh mobil ini sudah kembali. Kisah ini menjadi anekdot bahwa si pencuri telah "salah" mencuri mobil. Kisah ini menunjukkan betapa kejahatan jalanan pun mempunyai jejaring dalam ruang politik. Paralel literatur semacam ini misalnya dapat ditemui pada Frans Husken dan Huub de Jonge (2003), dan James T. Siegel (1998).

*The Rule of Law ; Democratization and Dark Side of Police Reform in Mexico*¹²

. Setelah Vincent Fox terpilih sebagai presiden melalui proses demokrasi gejala ketidakamanan meningkat. Kriminalitas menjadi pemandangan sehari-hari. Bahkan satu peristiwa, pada November 2004, gerombolan massa kota mengeroyok dua orang polisi hingga tewas. Dua orang ini ditengarai telah menculik dua anak sekolah lokal. Tak ada yang dapat melerai, gerombolan ini mempersenjatai diri dengan pisau dan kayu. Wartawan dengan bebas layaknya menyorotkan kamera pada pertunjukan di gelanggang resmi. Peristiwa ini menjadi fenomena "monumental"; Peristiwa yang menunjukkan kebencian dan dendam masyarakat terhadap polisi (dan umumnya penegak hukum) semacam ini dalam skala kecil terus terjadi setelah jatuhnya rezim otoritarian.

Peristiwa November 204 yang populer dengan sebutan "San Juan Ixtayopan" ini segera mengundang komentar dan diskusi banyak pihak di Meksiko. Carlos Monsivais, intelektual Meksiko yang disegani menandakan peristiwa itu sebagai endemic kekerasan dikalangan masyarakat Amerika Latin. Yacobo Zabudovsky, jurnalis senior melihatnya sebagai artikulasi 'reaksi' public terhadap korupsi di kalangan polisi sembari adanya pengasingan masyarakat dari birokrasi.

Apakah kalau demikian demokratisasi (di Meksiko) justru berbuah ketidakamanan? Pertanyaan semacam ini -- secara institusional demokratik -- dialamatkan pada rezim demokrasi dalam mengontrol institusi keamanan (kepolisian). Jadi pertanyaannya menjadi sejauh mana rezim demokrasi mampu mengontrol kepolisian ? Dalam menjawab persoalan tersebut, Diane, penulis jurnal ini melakukan studi kasus melalui telaah media massa, wawancara, dan studi dokumen.

Diane E. Davis menggunakan dua kerangka teori "middle range" untuk menjelaskan risetnya. O'Donnell; demobilisasi militer segera secara drastis setelah kemenangan rezim demokrasi mengundang ketidakamanan public. Dan, Charles Call; studinya di El Salvador ada hubungan antara demokrasi dengan ketidakamanan public. Demokrasi pada level Negara (desentralisasi dan power sharing, penguatan dan pembenahan partai politik akan cenderung diikuti konflik birokrasi. Kondisi ini akan melumpuhkan pemerintah dan

12. *Latin America Politics and Society; Spring 2006; 48,1; Academic Research Library.*

parlemen dalam mereformasi institusi keamanan public; hasilnya adalah kriminalitas.

Rezim Vox yang terpilih secara demokratis menggantikan sistem kekuasaan lama yang otoriter tidak mampu mereformasi kepolisian. Lembaga kepolisian warisan rezim lama yang lekat dengan korupsi dan tidak akuntabel justru melakukan perlawanan. Pemerasan terhadap masyarakat tak dapat berhenti dengan hadirnya pemimpin demokratis. Sejumlah pengamat menyarankan untuk meningkatkan remunerasi bersamaan dengan upaya profesionalisasi dan menghapus immunitas. Namun berat bagi rezim demokratik untuk mengikuti saran itu, karena momen kebijakan ekonomi makro menggelembungkan liberalisasi dan free trade area ; menggemukkan perusahaan-perusahaan privat dan ternyata mempersempit masuknya dan pada sector kapasitas public.

Kegagalan rezim demokrasi dalam menjamin keamanan public, dalam etika politik tidak harus menyurutkan demokrasi kebelakang. Maka selayaknya demokrasi tidak cukup diletakkan sebagai "proyek politik" karena didalamnya mengandung proyek social. Pengelolaan (reformasi) kepolisian yang dilakukan oleh rezim demokratik dalam kasus Meksiko tidak akan membuahkan hasil sekedar berbekal idealisme penguasa. Factor eksternal cukup kuat kaitannya dengan pendanaan. Jadi, liberalisasi yang umumnya terjadi pada proses demokratisasi justru mengerutkan pendanaan sector public.

Irlandia Utara. Jean Marie McGloin dari School of Criminal Justice, New Jersey USA meneliti pergeseran paradigma kepolisian disepanjang proses demokrasi¹³. Tahun 1998 lahir agreement yang merupakan kesepakatan politik, dan didukung oleh lebih dari 70 persen warga Irlandia Utara. Kesepakatan ini yang disebut sebagai *Good Friday Agreement*. Agreement ini mendesak perubahan otoritas dan struktur pemerintahan, sebetulnya secara tidak langsung mengaitkannya dengan lembaga kepolisian. Namun, dalam banyak literatur meledaknya tuntutan demokratisasi selalu diikuti isu penting tentang reposisi peran polisi. Agreement itu efeknya memunculkan lembaga Independen Commition on Policing. Komisi ini terdiri dari para akademisi, praktisi, dan politisi. Komisi inilah yang mengeluarkan "Patten Report" semacam rekomendasi kemana arah polisi harus diarahkan. Dalam "Patten Report"

13 <http://www.emeralgingsight.com/researchregister>

direkomendasikan sebuah badan perpolisian, Policing Board, yang terdiri dari 19 anggota. Badan ini terdiri dari lintas politik, agama, budaya, dan kelompok social. Diantara tugasnya adalah merumuskan tujuan (objectives), strategi, dan prioritas bagi polisi.

Rekomendasi utamanya adalah pergeseran polisi yang tersentral menjadi polisi yang 'kekinian', yang kompatibel dengan demokrasi pluralistic. Tepatnya, upaya menggeser polisi yang biasa menggunakan paksaan (police force) sebagai warisan dari paradigma kolonial menjadi model yang dikembangkan di kalangan Anglo-saxon. Pengertian ini adalah mengadopsi prinsip-prinsip perpolisian masyarakat (community policing); seperti pencegahan kejahatan (crime prevention), problem solving, order maintenance, local accountability, decentralization of outhority, collaboration and citizen participation.

Mawby (1990) yang dirujuk Jean Marie melakukan analisis secara komparativ system kepolisian kaitannya dengan kondisi masyarakat. Selanjutnya, organisasi polisi mempunyai tiga factor yang saling menyilang dalam masyarakat; legitimasi, struktur, dan fungsi. Terdapat tiga model perlisian: model Anglos Saxon, Model Kontinental, dan model Kolonial . Berikut adalah table variasi tiga model tersebut kaitnnya dengan legitimasi, struktur, dan fungsi.

Model Perpolisian	LEGITIMASI	STRUKTUR	FUNGSI
<i>Anglo Saxon</i>	<i>Local government</i>	<i>decentralized</i>	<i>Primary dealing with crime, some welfare activities</i>
<i>Continental</i>	<i>Central Government</i>	<i>Centralized, military force</i>	<i>Crime is only one function of the larger political and administrative duties.</i>
<i>Colonial</i>	<i>Colonial authority</i>	<i>Partially centralized force that is militerized, armed, and often consist of alien staff</i>	<i>Crime falls within a wider concern for political and administrative function</i>

Kepolisian Irlandia sebelum pergeserannya ke model Anglo Saxon direkrut secara diskriminatif, memilih orang-orang Irlandia beragama

protestan dan orang Inggris yang berlatar belakang militer. Dan, diantara ciri-ciri model colonial ini adalah kepolisian didesain oleh kalangan luar negeri, tentu didalamnya bertendensi melindungi kepentingan-kepentingan negara pendesian. Legitimasi local govermen dalam model Anglo Saxon berifat menggerakkan partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses perpolisian.

Kurang lebih temuan Jean Marie McGloin ini membantu menjawab kita di Indonesia berefleksi, kemana arah perjalanan intitusi Polri. Dalam sejarah berdirinya polisi di Indonesia berfungsi melindungi penguasa, seringkali ini merujuk pada Bhayangkara, Pasukan Majapahit. Hingga era Orde Baru polisi Indonesia berada dalam posisi yang sama, sementara Belanda selama lebih dari tiga ratus tahun memberikan warna continental. Persoalannya belakangan ini Polri mengadopsi Polmas (community policing) yang khas dalam model Anglo Saxon. Kalau jurnal ini menyebut tiga model atau paradigma, maka dalam kasus Indonesia apakah secara operasional "mix model" dimungkinkan dapat efektif ?

Riset Hung-En Sung. Hasil peneliti Hung-En Sung menarik untuk dicatat disini. Hung adalah dosen pada Department of Law, Police Science, and Criminal Justice Administration, John Jay College of Criminal Justice, New York, USA. Hung dengan metode kuantitatif menarik sampel dari 59 negara¹⁴. Kuestioner disebar terhadap 4000 eksekutif senior dari negara negara sampe tersebut. Tujuan penelitian ini bermaksud menjelaskan pengaruh demokratisasi terhadap kemampuan polisi dalam mengelola kondisi aman.

Issue (pentingnya) praktek perpolisian yang efektif mendapatkan momentum tahun 1980-an, menyusul tergelarnya gelombang ketiga demokratisasi utamanya di Asia dan Amerika Latin. Kemudian pada tahun 1990-an gerakan demokratisasi mulai dikaitkan secara lebih 'mendesak' dan strik dengan issue perpolisian yang efektif; kedua variable ini merupakan derivasi dari issu perpolisian yang demokratis (democratic policing). Konsolidasi institusi demokrasi membawa tuntutan terhadap pentingnya akuntabilitas, dan efektifitas pelayanan polisi. Sangat banyak studi yang mengasumsikan dua variable ini (demokrasi dan efektifitas perpolisian), namun studi-studi itu sekedar menempatkannya sebagai asumsi. Kebanyakan studi semacam ini tentang Negara transisi yang (juga) mendorong reformasi polisi secara

14 . www.emeraldinsight.com/1363-951x.htm

radikal dalam membangun polisi yang loyal terhadap penegakkan hak asasi manusia, penegakkan hokum dan pelayanan public. Sangat terbatas studi yang menganalisis pengaruh demokratisasi kaitannya dengan efektifitas perpolisian.

Dalam Negara otoritarian polisi bertindak represiv dalam banyak kasus (hampir) tidak menjadi persoalan isu politik, karena control lembaga politik tidak konsen terhadap realitas tersebut. Sebaliknya, dalam Negara liberal dan sistem demokrasi mendorong legal dan institusional terhadap praktek perpolisian. Demokratisasi sama dengan meledaknya ekspektasi public terhadap polisi. Nilai dan prinsip-prinsip demokrasi yang 'bekerja' dalam institusi politik maupun infrastruktur masyarakat merembet pada cara-cara polisi melakukan tugasnya. Disini masyarakat menuntut hak atas keamanan, termasuk didalamnya kebebasan organisasi kaitannya dengan control atas kiprah kepolisian. Partisipasi, ekuity, responsibilitas, kritis reveiu atas mekanisme yang ada diidentifikasi sebagai gambaran yang dituntut dari polisi dalam masyarakat demokrsi.

Sejumlah hipotesa yang diukur dalam penelitian ini merujuk pada hipotesa utama, yaitu; apakah berlaku hubungan kurva linier dalam hubungan demokrasi dengan efektifitas perpolisian. Temuannya, pertama, Kecenderungan kuat covex curvilinier dalam hubungan antara demokrasi suatu Negara dengan efektifitas perpolisian. Namun perlu catatan bahwa dalam Negara yang tidak demokratis sama sekali dan di bandul yang berseberangan Negara yang mempunyai pengalaman demokrsi, polisi juga cukup efektif dalam melakukan pekerjaannya.

Kedua, tingkat kejahatan (crime rates) menunjukkan tren meningkat dalam transisi demokrasi, ini tidak menjadi indicator untuk mengukur efektifitas perpolisian. Namun, realitas ini (meningkatnya) tren kejahatan justru menjadi factor penguat (conditioning factor) dalam mengontrol improvisasi efektifitas perpolisian. Ketiga, kepuasan public atas kinerja polisi tidak bisa dihubungkan langsung; ternyata diantarai oleh variable (intervening variable) perilaku rejim penguasa terhadap masyaakat. Rejim yang (semakin) progresiv dalam (re)distribusi akses menyangkut kesejahteraan mempegaruhi semakin baiknya persepsi masyarakat terhadap kinerja polisi.

Untuk sekedar berefleksi dari temuan penelitian Hung ini, perubahan

di tubuh Polri (reformasi Polri) dipengaruhi dua factor. Yaitu factor luar Polri dan factor internal, temuan jurnal ini membantu menjelaskan factor luar yang berpengaruh atas kinerja polisi, dalam hal ini adalah perilaku rejim kekuasaan. Bahwa ternyata factor perilaku rejim yang berkuasa mempengaruhi persepsi masyarakat dan dimensi desakan (tuntutan) terhadap institusi kepolisian untuk berubah. Tapi, jurnal ini tidak melihat factor dalam yang mempengaruhi dinamika perubahan di tubuh kepolisian. Yang jelas, ada hubungan kuat antara kinerja polisi dengan demokratisasi.

Epilog

Beruntung, Indonesia tak seperti Meksiko, tapi Indonesia tak seberuntung Irladia Utara. Indonesia menyerupai salah satu negara dari 59 negara sampel yang di-riset Hung-En Sung. Demokratisasi Meksiko bukan sekedar hanya memacetkan birokrasi, polisi pun melakukan perlawanan terhadap Presiden Fox yang terpilih secara demokratis. Reformasi polisi Meksiko yang diupayakan Presiden Fox terganjal ekonomi-politik pada tingkat makro karena rupanya demokrasi plus liberalisasi ekonomi mengerutkan kas negara. Tak cukup dana untuk mereformasi kepolisian; operasional polisi masih bertumpu pada mafia narkoba dan *trificking*. Demokratisasi di Indonesia tak sampai mengerutkan kas negara, sehingga tak ada persoalan dana reformasi kepolisian. Kapolri bekerja tanpa khawatir anak buah di bawahnya tak mampu menghidupi anak istri.

Daftar Pustaka

- Academic Research Library, Latin America Politics and Society; Spring 2006; 48,1
- Berger, Peter L.1990. *Revolusi Kapitalis*, terjemahan Mohamad Oemar, LP3ES, Jakarta.
- Durkheim, Emile.1965. *The Elementary Form of Relegious Life*, translated from the French by Josep Ward Swain, The Free Press, New York.
- Epstein, Richard A.2006. *Skeptisisme Dan Kebebasan; Pembelaan Modern untuk Liberalisme Klasik*, terjemahan Sugianto Tandra dan A. Zaim Rofiqi, Freedom Institute, Jakarta.

Esposito L. John et all.2002. *Dialektika Peradaban; Modernisme Politik dan Budaya di Akhir Abad Ke-20*, terjemahan Ahmad Syahidah, Qalam, Yogyakarta.

Giddens, Antony.1999. *The Third Way; Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*, terj. Ketut Arya Mahardika, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Held, David.2006. *Models of Democracy*, terjemahan Abdul Haris, Akbar Tanjung Institute, Jakarta.

Husken, Frans dan Huub de Jonge (edt.).2003. *Orde Zonder Order ; Kekerasan Dan Dendam di Indonesia 1965 – 1998*, terjemahan Imam Aziz, LkiS, Yogyakarta.

O'Donnell, Guillermo etall.1993. *Transisi Menuju Demokrasi*, terjemahan Ade Armando, LP3ES, Jakarta.

Sutanto et all (edt.).2004. *Community Policing; Falsafah Baru Pemolisian*, Lemdiklat Polri, Jakarta.

Uhlen, Anders.1997. *Oposisi Berserak*, terjemahan Rofik Suhud, Mizan, Bandung.

Seidman, Steven.1998. *Kontested Knowledge; Social Theory in the Postmodern Era*, Blacwell Publisher, Oxford, UK.

Siegel, James T.2000. *Penjahat Gaya (Orde) Baru; Eksplorasi Politik dan Kriminalitas*, terjemahan Noor Cholis, LKiS, Yogyakarta.

<http://www.emeraldinsight.com/researchregister>
www.emeraldinsight.com/1363-951x.htm